

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Kabupaten Padang Pariaman)**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

Rahmad Hidayat
2009/13011

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA SKPD DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN)**

Oleh:

Rahmad Hidayat

13011/2009

**Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode Maret 2015
dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing**

Padang, 19 Januari 2015

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001**

Pembimbing II



**Mayar Afriyenti, SE, M.Sc
NIP. 19840113 200912 02 005**

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman)

Rahmad Hidayat
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : rahmadhidayat2815@gmail.com

ABSCTRACT

This study aimed to determine: (1) The effect of financial management on the performance of local government, (2) The effect of the financial accounting system on the performance of local government areas.

Type of research is causative. The population in this study were all working units (SKPD) Padang Pariaman. Sampling was done using the formula slovin with tolerable error of 5%, and 32 samples obtained on education. The data collection method used is to use a questionnaire. The analysis used is multiple regression analysis using SPSS version 22.

The results showed that: (1) financial management a positive significant effect on the performance of local government, (2) financial accounting system area positive significant effect on the performance of local governments.

Keywords: Financial Management, Financial Accounting System, Local Government Performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, (2) Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Pariaman. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dengan kesalahan yang ditoleransi sebesar 5 %, dan diperoleh 32 sampel SKPD. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja pemerintah daerah, (2) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Abdul: 2007).

Kinerja telah menjadi salah satu kata kunci yang banyak dibicarakan diberbagai organisasi mulai dari organisasi perusahaan, pemerintahan, dan juga perguruan tinggi. Demikian juga kinerja masuk dalam setiap aspek sosial ekonomi kemasyarakatan. Kondisi ini terlihat dari banyak organisasi yang memasukkan kata kinerja dalam visi dan misinya. Pencapaian kinerja tidak hanya diharapkan pada karyawan saja melainkan dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan kinerja kelembagaan (Rosmawati: 2011)

Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan *output* yang berkualitas,

membandingkan hasil kerja dengan rencana kerja, serta menunjuk efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari pespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dikarena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Irvan: 2013).

Dalam meningkatkan kinerja organisasi tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang turut menentukan suatu organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja, baik yang telah dibuktikan secara empiris oleh peneliti-peneliti terdahulu, maupun faktor-faktor yang belum dimasukkan dalam penelitian. Abdul (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan Keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pula pada suatu instansi atau organisasi.

Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari

proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor lain yang turut menentukan suatu organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Mardiasmo dalam Almanda (2013) menerangkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah akan tercapai dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari

akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah (Wawan dan Lia: 2009). Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Wawan dan Lia: 2009).

Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai tidak hanya dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaran dana, tetapi sistem akuntansi keuangan daerah tersebut juga dapat mendukung pada pencapaian kinerja, penilaian pemerintahan yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja pemerintahan itu sendiri, pengukuran dalam pencapaian kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. (Wawan dan Lia: 2009).

Adapun fenomena yang terjadi saat ini, Ketua DPRD Padang Pariaman bersama dua pimpinan lainnya plus Sekretaris DPRD setempat Jumat (30/5/2014) sore ditahan jaksa penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Kejaksaan Negeri Kota Pariaman. Mereka ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Pariaman terkait dugaan korupsi bon makan dan minum serta perjalanan dinas di DPRD Padang Pariaman. Penahanan

empat tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi bon makan senilai Rp300 juta. Kasus perjalanan fiktif anggota dewan ini sudah beredar pada bulan Agustus tahun 2013 silam sesuai dengan temuan BPK-RI yang merilis laporannya tentang kerugian negara senilai Rp 1,2 miliar ditahun 2012.

Kemudian dalam penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur), dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan yang diikuti oleh semua Kasubag Perencanaan pada semua SKPD se Kabupaten Padang Pariaman. Target yang ingin dicapai untuk kegiatan ini adalah 10 SKPD dapat menyusun SOP Pelayanan, namun realisasinya hanya 1 SKPD yang sudah memiliki SOP Pelayanan atau terealisasi 0,1%. Padahal SOP sangatlah penting bagi peningkatan kinerja SKPD, karena SOP merupakan sebuah pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. (LAKIP Kabupaten Padang Pariaman 2013).

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian empiris dengan judul: “**Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Sejauhmana sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh bukti empiris:

1. Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah

Manfaat penelitian:

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Bagi Instansi Pemerintah daerah, dapat menjadi masukan tentang pentingnya pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja daerah.
3. Bagi Akademis, menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.
4. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Chabib (2011:3) kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dari suatu pemerintah daerah merupakan cerminan kualitas proses atau keberhasilan kegiatan/program yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk hasil berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja pemerintah daerah memiliki arti yang sangat penting bukan saja bagi masyarakat selaku pemilik kedaulatan, dan para donator selaku penyumbang dana, tetapi juga penting bagi Pemerintah Daerah sendiri selaku Eksekutif, terlebih-lebih bagi DPRD yang secara fungsional memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Menurut Chabib (2011:5) Arti penting kinerja pemerintah daerah di bagi menjadi enam bagian yaitu:

1. Sebagai umpan balik bagi Kepala Daerah untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang;
2. Untuk mencari kembali SKPD mana yang memberikan kontribusi terbesar dan SKPD mana yang kurang dalam memberikan

kontribusi terhadap proses pencapaian visi Kepala Daerah serta mengidentifikasi berbagai faktor penyebab keberhasilan dan kurangberhasilan dari setiap SKPD;

3. Untuk membangkitkan motivasi kerja Kepala SKPD dan jajarannya agar bekerja lebih produktif;
4. Untuk merumuskan kembali kebijakan, program dan kegiatan yang dinilai lebih efektif berikut penganggarannya serta metode/teknik pelaksanaan yang lebih efisien dalam proses pencapaian visi;
5. Melalui laporan kinerja, pemerintah daerah meninformasikan tingkat keberhasilan/kegagalannya secara jujur serta menjelaskan berbagai faktor kegagalannya baik kepada masyarakat, kepada para pemberi donasi, kepada DPRD dan kepada pemerintah tingkat di atasnya;
6. Meningkatkan derajat kepercayaan kepada masyarakat, bahwa dana publik yang dipercayakan kepadanya, telah dipergunakan sesuai amanat yang diberikan.

Menurut Mohamad (2006:77), Indikator kinerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa jenis yaitu:

1. Indikator masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator proses (*Process*). Dalam indikator ini, organisasi/instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan,

- maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Indikator keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik.
 4. Indikator hasil (*Outcomes*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Chabib (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas
2. Value for money
3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik
4. Transparansi
5. Pengendalian

Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
- b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.

- c. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.
- d. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.

2. Sistem akuntansi keuangan daerah

Menurut Abdul (2007: 42) Defenisi dari Akuntansi Keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi).

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi:

1. Pencatatan
2. Penggolongan dan pengikhtisaran
3. pelaporan

Akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu sehingga akuntansi memiliki lingkup yang luas. Oleh karena itu, akuntansi dibagi menjadi beberapa bidang berdasarkan pokok bahasan yang dikaji. Apabila pokok bahasan yang dikaji adalah entitas penyusunan laporan keuangan, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik atau terbagi menjadi akuntansi komersial, akuntansi pemerintahan (sektor publik) dan sosial. Dilain pihak apabila pokok bahasan yang dikaji adalah pengguna informasi akuntansi, maka akuntansi terbagi menjadi

akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Dalam sistematika ilmu akuntansi, dalam klasifikasi pertama kedudukan akuntansi keuangan daerah adalah dalam akuntansi sektor publik atau dalam akuntansi pemerintahan. Sedangkan dalam klasifikasi kedua, akuntansi keuangan daerah tergolong dalam akuntansi keuangan.

Penelitian Terdahulu

Irvan (2013) dalam penelitiannya tentang pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian Abdul (2009) tentang pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan dan implementasi keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan intern.

Hasil penelitian Wawan dan Lia (2009), menguji pengaruh pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat. Artinya pengawasan intern yang dilaksanakan efektif dan kontinyu

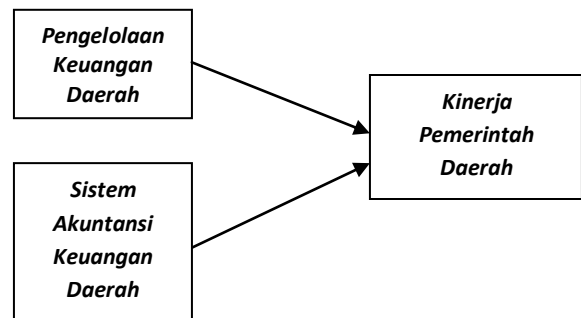
mempengaruhi pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan akan lebih baik dan sebaliknya pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang telah diterapkan dengan baik pada prinsipnya mempengaruhi pengawasan intern, karena pengawasan intern yang dilaksanakan.

Selanjutnya penelitian Almada, yang meneliti pengaruh pengawasan intern, dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh secara simultan dari pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu Kinerja Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen, pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Padang Pariaman. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dengan kesalahan yang ditoleransi sebesar 5 %, dan diperoleh 32 sampel SKPD

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data dalam penelitian ini adalah data subjek. Sumber Data penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner diantarkan langsung ke alamat responden dan untuk pengembaliannya akan dijemput sendiri oleh peneliti pada waktu yang telah ditentukan dan kuesioner harus diisi sendiri oleh pimpinan SKPD Kabupaten Padang Pariaman

Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel dependen nantinya. Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan daerah (X1), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu : Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KK), Jarang (JR), Tidak Pernah (TP).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas ini menggambarkan bahwa pertanyaan yang digunakan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (*valid*). Uji validitas dilakukan dengan menyebarkan minimal 30 kuesioner kepada mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

yang memiliki konsentrasi Akuntansi Sektor Publik.

2. Uji Reliabilitas

Kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam, 2007). Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan yang ada konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas Residual

Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan >0,05 maka akan berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lain, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Varsians Inflating Factor*) kecil dari 10 dan tolerance besar dari 0,10.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

1. Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item yang ditanyakan

2. Menghitung rata-rata skor total item dengan menggunakan rumus (Sugiono,2004:74)
3. Menghitung nilai rerata jawaban responden
4. Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskripsi variabel

Nilai persentase dimasukan kedalam kriteria sebagai berikut:

- a. Interval jawaban responden 76%-100% kategori jawabannya baik
- b. Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik
- c. Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik.

2. Metode Analisis Data

a. Uji Regresi Berganda

Alat uji yang digunakan adalah *Regresi Linear Berganda*. Uji digunakan karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

B_{12} = Koefisien regresi dari variable independen

X_1 = Pengelolaan Keuangan Daerah

X_2 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

a = constant

e = epsilon

b. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak, nilai sig $0,000^a < 0.05$ menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistic yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

b. Uji t (t-test)

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi berganda secara parsial. Uji t juga dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah

koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak. Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diuji pada tingkat signifikan $\beta = 0,05$ kesimpulan hipotesis yang disajikan untuk H_1, H_2, H_3, H_4 didasarkan atas:

1. Jika tingkat signifikansi $\leq \beta = 0,05$ maka tersedia bukti yang cukup untuk menerima hipotesis H_1 dengan demikian dapat dikatakan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Jika tingkat signifikansi $\geq \beta = 0,05$ maka hipotesis H_1 s.d H_2 ditolak dengan demikian dapat dikatakan pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Definisi Operasional

1. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan

Kuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel dan Responden Penelitian

Jumlah sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap sampel memiliki dua responden jadi jumlah sampel dari penelitian ini adalah 64 responden. Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner 50 responden dan semuanya mengisi dengan lengkap. Kuesioner yang dapat diolah adalah 50 kuesioner.

Statistik deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendiskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti.

Berdasarkan tabel 15 diatas dapat dilihat statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Untuk variabel X_1 diketahui besarnya nilai mean adalah 36,32 dengan standar deviasi 3,857; nilai maximum sebesar 43; nilai minimum sebesar 28 dan range sebesar 15. Untuk variabel X_2 diketahui nilai mean 47,88 dengan standar deviasi 3,815; nilai maximum 56; nilai minimum sebesar 37 dan range sebesar 19. Untuk Y dengan nilai mean 42,88; dengan standar deviasi 5,086; yang nilai maximum 50; nilai minimum sebesar 29 dan range sebesar 21.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Colleration*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 50$, adalah 0,279. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Colleration* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 dan Y semuanya di atas r_{tabel} yang dapat dilihat pada tabel 16. Maka dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 dan Y adalah valid.

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen Kinerja Pemerintah Daerah diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,334, untuk instrument Pengelolaan Keuangan Daerah nilai terkecil 0,354, dan untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah nilai terkecil 0,352.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang konstan. Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel, jika nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen pernyataan lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2006). Dari nilai *cronbach's alpha* dapat disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan adalah reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,6. Untuk lebih jelasnya akan disajikan pada Tabel 17 sebagai berikut:

Dari hasil nilai *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel 17 diatas yaitu untuk instrumen Kinerja Pemerintah Daerah adalah 0,783, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 0,782 dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah 0,649 ini menunjukkan nilai berada diatas 0,6. Dengan demikian semua instrument dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Hasil uji normalitas residual dari pengolahan SPSS dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi dari hasil uji *kolmogorov smirnov*. Uji *kolmogorov smirnov* dilakukan untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal, dengan melihat nilai $\alpha > 0,05$. Dari analisis data diperoleh hasil bahwa residual terdistribusi secara normal. Dari tabel uji normalitas terbukti nilai *kolmogorov smirnov* sebesar 0,852 dan nilai signifikansinya $0,200 > 0,05$.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji tidak adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui *Variance Inflation factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* $> 0,1$. Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) dengan nilai VIF 1.303, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) dengan nilai VIF 1.303. Pada Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) dengan nilai *tolerance* 0,767, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) dengan nilai *tolerance* 0,767. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu sama yang lainnya, atau variabel *independen* pada penelitian bebas multikol. Dan ini dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini :

Pengujian Model

1. Uji F

Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari hasil uji

regresi berganda, seperti dapat dilihat pada tabel 20 dibawah ini:

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan cara membandingkan F_{tabel} dan F_{hitung} . Hipotesis diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig $> \alpha$ 0,05. Nilai F_{tabel} pada α 0,05 adalah 2,012. Nilai F_{hitung} adalah 53,990 sedangkan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha$ 0,05 yaitu $53,990 > 2,012$ dan sig $0,000 < \alpha$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

2. Koefisien Determinasi (*R square*)

Nilai *Adjusted R square* menunjukkan 0,684. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap variabel terikat yaitu Kinerja Pemerintah Daerah 68,4% sedangkan 31,6% ditentukan oleh faktor lain. Nilai *Adjusted R square* dapat dilihat pada tabel 21 berikut:

3. Koefisien Regresi

Koefisien regresi berganda dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$. Secara rinci hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada tabel 22 berikut:

Pada tabel 22 diatas dapat disubsitusikan ke dalam estimasi sebagai berikut :

$$Y = -4,248 + 0,952 X_1 + 0,262 X_2 + e$$

Dimana :

- a = Konstansta
- b_1, b_2 = Koefesien regresi dari masing- masing variabel
- X_1 = Pengelolaan Keuangan Daerah
- X_2 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- Y = Kinerja Pemerintah Daerah

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar -4,248 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah nol maka nilai Kinerja pemerintah Daerah -4,248.
- b. Koefesien Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,952, artinya jika Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami kenaikan satu satuan, maka Kinerja Pemerintah Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,952 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif 0,952.

c. Koefisien Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,262, artinya jika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mengalami kenaikan satu satuan, maka Kinerja Pemerintah Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,262 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif 0,262.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan (a) t_{hitung} dengan t_{tabel} atau (b) nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha 0,05$. Berdasarkan nilai t_{hitung} dan signifikan yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 22.

1. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 2,0017. Untuk variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) nilai t_{hitung} adalah 7,869 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $7,869 > 2,0017$ atau nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,952. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pengelolaan keuangan daerah, maka terjadi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini diterima.

2. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan

t_{tabel} . Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 2,0017. Nilai t_{hitung} untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) adalah 2,147 dan nilai sig 0,037. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,147 > 2,0017$) dan nilai signifikan $0,037 < \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,262. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H_1) yaitu pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik pengelolaan keuangan maka akan terjadi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul (2009) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2013), bahwa pengelolaan keuangan yang berorientasi kepada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja. akuntabilitas

kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggaraan pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh data dari distribusi frekuensi dari variabel pengelolaan keuangan daerah yang mana total TCR 80,71%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dimana semakin baik pengelolaan keuangan daerah, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

Jadi dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka akan baik juga kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini

sesuai dengan teori yang dikemukakan Mardiasmo dalam Almada (2013) yang mana kinerja pemerintah daerah akan tercapai dengan dilaksanakannya sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap kinerja pemerintah yang dicapai.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, oleh karena itu sistem akuntansi keuangan daerah diupayakan untuk terus berjalan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh data dari distribusi frekuensi dari variabel sistem akuntansi keuangan daerah yang mana total TCR 79,53%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dimana semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah yang baik dalam organisasi merupakan tuntutan dari otonomi daerah yang mana masyarakat di era reformasi saat sekarang ini meminta pelayanan yang transparan dan responsif.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.

Keterbatasan dan Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Instansi agar selalu taat pada peraturan atau prosedur dalam melakukan kegiatan, serta mengusahakan ketepatan waktu dalam menghasilkan barang atau jasa.
2. Instansi agar lebih sering melakukan evaluasi kinerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan.
3. Dalam melakukan penjurnalan dan postingan sebaiknya dilakukan sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Rohman. (2009). *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 9 No. 1:21-32. (16 Februari 2011).
- Almanda Primadona. (2013). *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.
- Askam Tuasikal (2008). *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. (Studi Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Maluku)* ISSN:1410-8623.
- Chabib Soleh. 2009. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* Bandung: Fokus Media.
- Eko Hariyanto. 2005. *Peranan Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Good Governance*.
- Halim, Abdul dan Theresia.2007. *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*

- Edisi kedua*. Yogyakarta : UPP
STIM YKPN.
- Ihyaul, Ulum. 2004. *Akuntansi sektor publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iman Pirman Hidayat (2008). *Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD*. ISSN :1907-9958.
- Irvan Saefulloh (2013). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mohamad Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 134 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Umar Husein. 2003. *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang *Sumber-Sumber Keuangan Daerah*.
- Veithzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari (2009). *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. ISSN:1907-9958.

KUESIONER

KARAKTERISTIK UMUM RESPONDEN

1	No Responden:	
2	Nama:	
3	Jenis Kelamin: 1. Laki-Laki 2. Perempuan	<input type="checkbox"/>
4	Umur:	<input type="text"/>
5	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan: 1. SMA/ sederajat 3. S1 5. S3 2. D3 4. S2 6. Lainnya (.....)	<input type="checkbox"/>
6	Lama Bekerja:	

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pertanyaan dibawah ini, kemudian berilah tanda *check list* (\checkmark) satu dari lima alternatif jawaban yang terdapat dalam pertanyaan tersebut.

I. Pengelolaan Keuangan Daerah

1	<p>Bagaimana tingkat kesesuaian dalam mengelola keuangan dengan prosedur yang ada?</p> <p>1. Sangat Sesuai 2. Sesuai 3. Cukup Sesuai 4. Kurang Sesuai 5. Tidak Sesuai</p>
2	<p>Apakah kebijakan atau keputusan yang terkait pengelolaan keuangan yang diambil tidak bisa dipertanggungjawabkan?</p> <p>1. Tidak Bisa 2. Kurang Bisa 3. Ragu-ragu 4. Bisa 5. Sangat Bisa</p>
3	<p>Apakah sudah sesuai standar antara biaya yang dikeluarkan dengan penggunaan input?</p> <p>1. Sangat Sesuai 2. Sesuai 3. Cukup Sesuai 4. Kurang Sesuai 5. Tidak Sesuai</p>
4	<p>Apakah instansi kurang adil dan merata dalam pelaksanaan, pengadaan, dan pengelolaan keuangan?</p> <p>1. Tidak Adil 2. Kurang Adil 3. Cukup Adil 4. Adil 5. Sangat Adil</p>
5	<p>Apakah seluruh elemen dalam instansi telah memenuhi syarat kejujuran dan integritas dalam bekerja?</p> <p>1. Sudah secara menyeluruh 2. Sebagian Besar 3. Ragu-ragu 4. Sebagian Kecil 5. Tidak</p>
6	<p>Bagaimanakah keterbukaan instansi dalam pengelolaan keuangan terhadap elemen masyarakat?</p> <p>1. Sangat Terbuka 2. Terbuka 3. Cukup Terbuka 4. Kurang Terbuka 5. Tidak Terbuka</p>
7	<p>Berapa banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengadaan kegiatan/anggaran?</p> <p>1. Sangat Banyak 2. Banyak 3. ragu-ragu 4. Sedikit 5. Tidak Ada</p>
8	<p>Seberapa sering instansi melakukan evaluasi kinerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan?</p> <p>1. Sangat Sering 2. Sering 3. Cukup Sering 4. Kurang Sering 5. Tidak Pernah</p>
9	<p>Apakah setiap evaluasi kinerja pengelolaan keuangan sering ditindaklanjuti atau diantisipasi langkah kedepannya?</p> <p>1. Tidak Pernah 2. kurang Sering 3. Cukup Sering 4. Sering 5. Sangat Sering</p>

II. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

1	Apakah sistem pencatatan keuangan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang baik? 1. Sangat Sesuai 2. Sesuai 3. Cukup Sesuai 4. Kurang Sesuai 5. Tidak Sesuai
2	Apakah pencatatan keuangan yang digunakan selama ini efektif? 1. Sangat Efektif 2. Efektif 3. Cukup Efektif 4. Kurang Efektif 5. Tidak Efektif
3	Apakah pencatatan keuangan yang dilakukan telah relevan dengan fakta/keadaan keuangan yang ada? 1. Sangat Relevan 2. Relevan 3. Cukup Relevan 4. Kurang Relevan 5. Tidak Relevan
4	Seberapa sering terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pencatatan keuangan? 1. Sangat Sering 2. Sering 3. Cukup Sering 4. Kurang Sering 5. Tidak Pernah
5	Apakah pencatatan keuangan yang dilakukan menimbulkan dampak yang baik bagi instansi? 1. Sangat Setuju 2. Setuju 3. Ragu-ragu 4. Kurang Setuju 5. Tidak Setuju
6	Apakah dalam melakukan transaksi ekonomi tidak dilakukan identifikasi/pengklasifikasian? 1. Tidak Semuanya 2. Sebagian Besar Tidak 3. Ragu-ragu 4. Sebagian Kecil Dilakukan 5. Semua Dilakukan Identifikasi
7	Apakah penjurnalan dan postingan yang dilakukan sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan pemerintah? 1. Tidak Semuanya 2. Sebagian Besar Tidak 3. Ragu-ragu 4. Sebagian Kecil Dilakukan 5. Semua Sesuai Nomor
8	Seberapa sering terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam penggolongan atau pengklasifikasian kegiatan/transaksi ekonomi? 1. Tidak Pernah 2. Kurang Sering 3. Cukup Sering 4. Sering 5. Sangat Sering
9	Bagaimanakah tingkat kesesuaian pelaporan yang dilakukan dengan keadaan sebenarnya dalam kegiatan yang dilakukan? 1. Sangat Sesuai 2. Sesuai 3. Cukup Sesuai 4. Kurang Sesuai 5. Tidak Sesuai

10	Apakah pelaporan atau buku laporan yang dibuat telah sesuai prosedur yang berlaku? 1. Sangat Sesuai 2. Sesuai 3. Cukup Sesuai 4. Kurang Sesuai 5. Tidak Sesuai
11	Apakah pelaporan atau buku laporan yang dibuat telah relevan dengan fakta keuangan yang ada? 1. Sangat Relevan 2. Relevan 3. Cukup Relevan 4. Kurang Relevan 5. Tidak Relevan
12	Seberapa sering terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaporan keuangan? 1. Sangat Sering 2. Sering 3. Cukup Sering 4. Kurang Sering 5. Tidak Pernah

III. Kinerja Pemerintah Daerah

1	Bagaimana tingkat kesesuaian antara jumlah dana yang diberikan dengan realisasi kegiatan/kinerja? 1. Sangat Sesuai 2. Sesuai 3. Cukup Sesuai 4. Kurang Sesuai 5. Tidak Sesuai
2	Apakah pegawai-pegawai yang ada memenuhi syarat dan berkompeten dalam bidangnya? 1. Semua 2. Sebagian Besar 3. Ragu-Ragu 4. Sebagian Kecil 5. Tidak Ada
3	Apakah sering terjadi ketidakdisiplinan pegawai-pegawai dalam pekerjaan? 1. Sangat Sering 2. Sering 3. Cukup Sering 4. Kurang Sering 5. Tidak Pernah
4	Apakah sering terjadi ketidaktaatan peraturan/prosedur dalam kegiatan yang dilakukan? 1. Sangat Sering 2. Sering 3. Cukup Sering 4. Kurang Sering 5. Tidak Pernah
5	Apakah sering terjadi jumlah hasil dari proses atau kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan? 1. Sangat Sering 2. Sering 3. Cukup Sering 4. Kurang Sering 5. Tidak Pernah

6	Seberapa sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam menghasilkan sesuatu (barang dan jasa) dari suatu kegiatan? 1. Sangat Sering 2. Sering 3. Cukup Sering 4. Kurang Sering 5. Tidak Pernah
7	Apakah kualitas suatu hasil dari proses atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan? 1. Sangat Sesuai 2. Sesuai 3. Cukup Sesuai 4. Kurang Sesuai 5. Tidak Sesuai
8	Bagaimanakah tingkat produktivitas pegawai-pegawai yang ada? 1. Sangat Produktif 2. Produktif 3. Cukup Produktif 4. Kurang Produktif 5. Tidak Produktif
9	Apakah hasil dari suatu proses atau kegiatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat? 1. Sangat Bermanfaat 2. Bermanfaat 3. Cukup Bermanfaat 4. Kurang Bermanfaat 5. Tidak Bermanfaat
10	Apakah hasil dari suatu proses atau kegiatan yang dilakukan memberikan dampak atau pengaruh yang baik bagi masyarakat? 1. Dampak yang Baik 2. Dampak yang Cukup Baik 3. Ragu-ragu 4. Dampak yang Kurang Baik 5. Dampak yang Tidak Baik
11	Apakah kinerja pemerintah yang telah dilakukan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 1. Sangat Bisa 2. Bisa 3. ragu-ragu 4. Kurang Bisa 5. Tidak Bisa

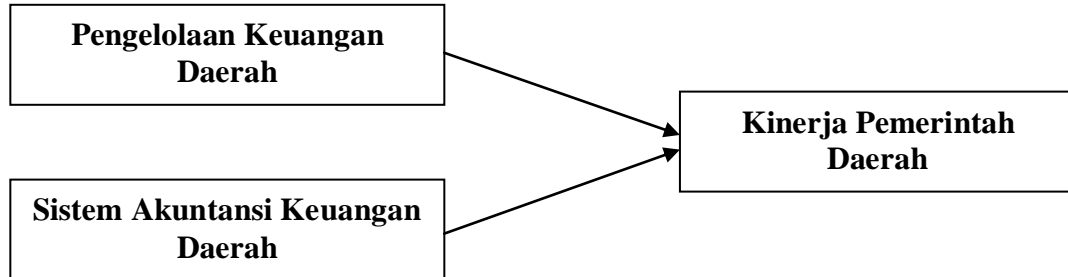
BAGIAN PENUTUP

Atas bantuan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Rahmad Hidayat
13011/2009

LAMPIRAN



**Gambar
Kerangka Konseptual Penelitian**

Hasil Uji Analisis

A. Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Y	50	21	29	50	2144	42,88	5,086
X1	50	15	28	43	1816	36,32	3,857
X2	50	19	37	56	2394	47,88	3,815
Valid N (listwise)	50						

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,80059002
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,087
	Negative	-,081
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	,767	1,303
	X2	,767	1,303

a. Dependent Variable: Y

Pengujian Model

1. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	882,958	2	441,479	53,990	,000 ^b
Residual	384,322	47	8,177		
Total	1267,280	49			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

2. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,835 ^a	,697	,684	2,860

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

3. Koefisien Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4,248	5,376		-,790	,433
X1	,952	,121	,722	7,869	,000
X2	,262	,122	,197	2,147	,037